

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan diusahakan agar berjalan secara seimbang dan saling mendukung antara satu sektor dengan sektor lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan total pendapatan dan pendapatan perorangan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan di iringi dengan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk negara. (Dwi Anggiani,2019).

Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan standar hidup, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat difokuskan diseluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.(Fitasari,2021)

Pembangunan daerah merupakan salah satu proses yang dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan merangsang perkembangan kegiatan perekonomian yang ada pada wilayah tersebut. (Arsyad,1999).

Dengan kebijakan mengenai keuangan daerah diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang jelas, dinamis, dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota terutama pada bidang pendanaan. Memaksimalkan pendapatan lokal, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial sambil mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal yang telah dipungut selama ini. Untuk mencapai kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat krusial, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri.(Dwi Anggiani,2019).

Adapun cara untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah melalui pajak daerah. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah memiliki peran dan juga potensi yang penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.(Resmi,2017).

Dari berbagai opsi sumber penerimaan yang mungkin dikumpulkan oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat diperluas sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah

harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya dengan menggunakan sistem dan prosedur pengumpulan pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi terhubung oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, jika potensi tidak ditentukan dengan benar, maka realisasi penerimaan juga akan rendah. (Dwi Anggiani,2019).

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin meningkat seiring dengan semakin pentingnya sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, “pajak atas hotel disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan restoran”. Adanya perubahan Undang-Undang tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009”.(Dwi Anggiani,2019).

Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan besarnya potensi keberadaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin meningkat seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan, maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah

adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang.(Dwi Anggiani,2019).

Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hotel dan restoran yang sudah berdiri pada saat ini di Kota Makassar, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kota Makassar. Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya Pajak Hotel dan restoran selain dari sektor pajak daerah lainnya.

Tabel 1.1 Data Realisasi PAD dan Pajak Tahun 2016-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Pajak	
	Nama Pemda	PAD	Nama Pemda	Nilai Anggaran
2016	Kota Makassar	971.859.753.606	Pajak Hotel	63.461.772.673
			Pajak Restoran	115.009.325.364
2017	Kota Makassar	1.337.231.094.232	Pajak Hotel	92.970.091.185
			Pajak Restoran	140.867.931.067

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Melalui data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan (KemenKeu) tercatat bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sebesar Rp. 971.859.753.606, sedangkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Makassar pada tahun 2016 sebesar Rp. 63.461.772.673 dan Rp. 115.009.325.364. Dan seterusnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp. 1.337.231.094.232, sedangkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran menyentuh angka sebesar Rp. 92.970.091.185 dan Rp. 140.867.931.067. Dengan peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Kota Makassar.

Penelitian yang juga pernah dilakukan oleh Ebstiam Lukman Basyarahil dan Ririn Irmadayani (2019) menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel pada tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember karena persentase kontribusi tiap tahunnya kurang dari 20%. Begitu juga dengan kontribusi penerimaan Pajak Restoran selama tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember. Hasil tersebut menandakan bahwa proporsi dari Pajak Hotel maupun Pajak Restoran kecil terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan dari Intan Noor Fitasari (2021) menunjukkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Sleman cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan kecuali pada tahun 2020.

Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Dwi Anggiani MN (2019) menunjukkan bahwa dari adanya kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar anggaran 2014-2018 semakin meningkat.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu maka kiranya peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam bentuk variabel independen dan dependen, beberapa aspek dari metode penelitian, namun adapun yang membedakan seperti tahun penelitian yang dimana pada penelitian ini diambil dari tahun 2019-2022, dan teori yang digunakan. Sehingga penelitian ini pasti akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Hotel berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?
2. Apakah Pajak Hotel berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian yaitu :

1. Menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
2. Menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

- a. Penelitian ini diharapkan akan menjadi panduan bagi penelitian-penelitian lain yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas serta meningkatkan pemahaman dan informasi, terutama terkait dengan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memberikan kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah melalui penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman serta pengetahuan praktis peneliti tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, khususnya mengenai kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Daerah terhadap Kota Makassar.

c. Bagi Universitas

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan diwaktu yang akan

datang dan dapat menambah sumber referensi di bidang penelitian akuntansi perpajakan.